Identitas Etnis Dalam Ranah Politik (Studi Kasus Pilkades Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat)

Muhammad Nawir¹, Sam'un Mukramin²

¹Pendidikan Sosiologi FKIP, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: Muhammadnawair@unismuh.ac.id

² Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: samunmukmin@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran politik identitas etnis dalam ranah politik dan untuk mengidentifikasi dampak politik identitas etnis dalam pilkades di Desa Siru Kecamatan Lembor kabupaten Manggarai Barat. Informan ditentukan secara *purposive sampling*, diambil sesuai dengan kebutuhan yang dianggap mampu memberi informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, informan yang ditetapkan yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui berbagai tahapan, seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, waktu dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran identitas etnis dalam ranah politik pada setiap pilkades di Desa Siru cukup jitu dijadikan jargon oleh masing-masing kontestan sebagai simbol dan basis untuk mencapai kekuasaan atau sebagai kepala desa. Strategi ini dinilai sukses dengan melihat kondisi masyarakat di Desa Siru yang multi etnis. Sudah beberapa kali dilakukan pilkades pada umumnya didominasi dan dimenangkan oleh etnis Ndahe sebagai etnis mayoritas. Adapun dampak dari politik identitas etnik ini adalah terjadinya konflik yang tergolong ke dalam konflik kepentingan. Hasil konstruksi identitas dalam kontestasi pilkades memunculkan suatu situasi yaitu individu-individu mengidentifikasikan dirinya dengan sesama etnis sehingga lahir suatu sikap *ethnosentrisme* dan menimbulkan konflik social berskala kecil. Meski konflik tersebut tergolong konflik ringan dan tidak bersifat permanen.

Kata Kunci : Identitas Etnis, Politik, Pilkades.

Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pemilihan pemimpin di wilayah Indonesia sejak era reformasi menemui jalan terang. Bagaimana tidak, sosok seorang pemimpin sebelumnya biasanya diangkat atau ditunjuk bukan berdasarkan prestasi dan kinerja melainkan factor kedekatan dengan orang yang

sedang berkuasa saat itu. Dapat dipastikan bahwa gubernur yang dilantik adalah pilihan presiden, bupati, wali kota yang dilantik adalah pilihan gubernur atas persetujuan presiden. Demikian pula camat pampai kepala desa yang diangkat adalah pilihan bupati atau wali kota, sehingga semuanya harus loyal dan satu suara dengan atasannya. Kurang lebih seperti itulah gambaran sederhana situasi dan kondisi kehidupan demokrasi sebelum reformasi.

Dalam kehidupan berdemokrasi, pada kontestasi politik baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, peran identitas etnis memiliki andil yang signifikan sebagai basis untuk mencapai kekuasaan. Identitas etnis dalam ranah politik atau dengan kata lain politik identitas etnis kemudian dipolitisasi demi untuk kepentingan politik. Tujuannya adalah agar setiap individu dalam menentukan pilihannya didasarkan pada hasil pengidentifikasian dengan kesamaan etnis, dalam arti bahwa program-program yang dikampanyekan oleh kontestan tidak lagi menjadi bahan referensi utama oleh calon pemilih. Pemandangan seperti ini dalam kontestasi demokrasi sudah menjadi hal yang lumrah.

Melihat fenomena yang terjadi demikian, ada penguatan dan pengentalan identitas sebagai basis perebutan kekuasaan politik. Politisasi identitas ini terjadi sebab identitas etnis dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan bagi elit-elit politik. Politik identitas etnis pada awalnya berangkat dari adanya persamaan, seperti persamaan nasib, territorial, keyakinan (agama) dan sebagainya, telah dijadikan sebagai instrumen untuk mendapatkan simpati publik. Dari sini dapat dilihat bahwa identitas etnis dalam ranah politik mengalami transformasi pemaknaan identitas karena proses identitas dibuat untuk kepentingan orang-orang yang membuatnya. Segala elemen-elemen etnisitas dapat menjadi kekuatan untuk memperoleh legitimasi dan menghegemoni masyarakat. Elemen etnis bukan lagi sesuatu yang tidak penting dan tertinggal tetapi justru menjadi kekuatan yang ampuh dalam pemilihan khususnya kontestasi di tingkat lokal (desa).

Desa Siru menjadi salah satu desa yang memiliki keragaman etnis, ditemukannya minimal ada empat etnis dengan jumlah populasi yang relatif bervariasi, yakni etnis Ndahe, Tere, Jombok dan Pa'ang. Dari ke-empat etnis tersebut, etnis Ndahe merupakan etnis yang memiliki populasi penduduk terbanyak. Eksistensi dari keempat etnis tersebut sudah ada sejak zaman dulu dan berkembang sampai sekarang. Keberadaan ke-empat etnis di Desa Siru dalam sejarah perkembangan desa ini, memiliki peran penting dalam aspek politik.

Pada kontestasi demokrasi pilkades di Desa Siru, etnis Ndahe menjadi etnis yang keterwakilannya menduduki jabatan sebagai kepala Desa Siru terbanyak sepanjang sejarah berdemokrasi di desa tersebut. Jika melihat fakta, etnis Ndahe merupakan etnis yang

memiliki populasi penduduk terbanyak dibandingkan dengan etnis lainnya. Strategi kemenangan yang menjadi instrumen kontestan perwakilan etnis Ndahe, merasa perlu diteliti untuk di ekspos dalam tulisan ini. Perhatian khusus terkait peran identitas etnis (politik identitas) dalam ranah politik, apakah ikut serta dalam kesuksesan etnis Ndahe sehingga mendominasi dalam menduduki jabatan sebagai kepala Desa Siru. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam kontestasi lokal, bahwa etnis sebagai komoditas dalam perebutan kekuasaan. Politisasi etnis memungkinkan bahwa visi misi maupun program kerja yang dikampanyekan oleh kontestan boleh jadi tidak memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi pemilih melainkan kesamaan etnis adalah referensi utama pemilih.

Kajian Teori

Dalam pandangan teori instrumentalisme, identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan. Identitas dipahami sebagai sesuatu yang tidak statis karena selalu ada perubahan dalam relasi antar identitas serta berkembangnya produk wacana politik dari elit yang berkuasa. Instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras, dan bahasa (Aini dalam Kinasih, 2005: 17).

Etnisitas merupakan identitas yang berkaitan dengan kebudayaan. Identitas etnis juga dapat menjadi basis bagi suatu kelompok masyarakat ketika menyuarakan tuntutan (aspirasinya). Melalui politik identitas, kelompok identitas etnis akan melakukan upaya untuk mendapatkan pengakuan politik serta upaya afirmasi atas kelompok mereka yang ter subordinasi di masyarakat. Adanya kelompok identitas dominan dan kelompok identitas yang marginal di satu sisi memang sangat mungkin terjadi pada suatu negara multikultur. Selain upaya politik identitas, identitas etnis juga dapat digunakan sebagai instrumen dalam politik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Brown (dalam Barker, 2004), bahwa :

"Ethnicity constitutes one of several forms of association through which individuals pursue their interests relating to economic and political advantage. But there is more to ethnicity

than this, since it appears to offer intrinsic satisfaction as well as instrumental utility”.

“Etnis merupakan salah satu bentuk asosiasi yang digunakan oleh individu-individu dalam mengejar kepentingan mereka terkait keuntungan ekonomi dan politik. Namun lebih daripada itu, etnisitas menawarkan kepuasan intrinsik dan kegunaan yang penting”.

Dari pemaparan Brown tersebut, dapat dilihat bahwa etnis dapat dipolitisasi atau dimanfaatkan sebagai instrumen dalam mengejar keuntungan ekonomi dan politik. Pada aspek ini, etnisitas tidak lagi sebagai kelompok etnis berjuang melakukan upaya afirmasi. Namun lebih daripada itu, identitas etnis dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengejar kepentingan politik. Fenomena ini banyak terjadi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini sangat menarik untuk dicermati karena memperlihatkan suatu paradoks demokrasi di mana pada satu sisi kebebasan dan keberagaman semua kelompok harus dijamin, namun di sisi lain ternyata kebebasan dan keberagaman tersebut dapat digunakan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu. Lebih lanjut, penjelasan mengenai etnis dalam politik pada penelitian ini menggunakan teori elit yang melihat etnisitas sebagai suatu instrumen dan sumber daya politik. Teori elit klasik berangkat dari analisis Mosca, Pareto, dan Michels. Teori ini membahas mengenai peranan elit dalam politik. Pareto mendefinisikan elit sebagai sebuah kelas dari orang-orang yang berada pada puncak tertinggi dari tatanan aktivitas yang mereka lakukan. Elit sendiri kemudian terbagi menjadi elit penguasa (*ruling elite*) dan elit yang menunggu untuk dapat berkuasa (*elites in waiting*). Perkembangan teori elit kemudian membuat sudut pandang dalam melihat fenomena kepentingan elit politik semakin berkembang, salah satunya teori elit politik yang berbasiskan etnisitas.

Teori konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan

terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak (Wirawan, 2010 : 1-2).

Teori dominasi sosial, dikemukakan oleh Jim Sidanius dan Felicia Pratto. Pada teori ini dijelaskan bahwasannya manusia mempunyai kecenderungan khusus untuk membuat hierarki atau tingkatan dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang berbeda dalam hierarki tersebut. Hierarki tersebut dapat berdasarkan kelompok sosial atau karakteristik individu. Teori dominasi sosial ini menjelaskan bahwa dalam kelompok sosial selalu terbentuk struktur hierarki atau tingkatan sosial. Hal ini menunjukkan terdapat sejumlah kelompok sosial yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu kelompok sosial atau individu yang berada di bagian atas hierarki (*dominan*) dan juga kelompok sosial atau individu yang berada di bagian bawah hierarki (*subordinat*). Kelompok sosial atau individu dominan digambarkan dengan nilai-nilai positif yang mereka miliki atau berdasarkan hal-hal yang bersifat materi atau simbolik. Kelompok atau individu dominan biasanya memiliki kekuasaan politik atau otoritas, memiliki sumber daya yang baik dan banyak, memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi. Hal ini bertolak belakang dengan kelompok sosial atau individu subordinat adalah kelompok atau individu yang memiliki status sosial dan kekuasaan rendah.

Christ (2003) menyebutkan, bahwa solidaritas politik merupakan gejala postmodern politik. Gejala ini ditandai dengan akomodirnya kekuatan sosial dalam politik. Ost melihat politik sebagai alat dan tujuan sekaligus. Karena sebagai alat dan tujuan sekaligus maka politik memang harus menyertakan banyak aspek di dalamnya. Banyak aspek itu harus disertakan agar elit politik bisa mendapatkan kekuasaan dalam alam liberalisasi politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Seluruh data yang diperoleh akan dideskripsikan secara kualitatif, untuk melakukan pengkajian secara mendalam, menemukan bukti-bukti empiris terhadap kasus yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam, di mana peneliti sendiri

berfungsi sebagai instrumen utama dengan menggunakan beberapa alat bantu, seperti alat tulis, alat perekam dan HP kamera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Politik Identitas Etnis dalam Pilkades di Desa Siru

Dari hasil observasi langsung di lapangan dan wawancara terhadap beberapa informan, diperoleh informasi bahwa identitas etnis memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap ranah politik khususnya dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Siru. Penulis dapat mengidentifikasi tindakan atau strategi yang dilakukan oleh masing-masing calon kepala desa bersama timnya, yaitu ; tindakan manipulasi dan mobilisasi, dominasi sosial dan solidaritas politik.

a. Tindakan Manipulasi dan Mobilisasi

Peran politik identitas etnis dalam penerapannya sangat sistemik dan terorganisir dengan merangkul individu atau komunitas berdasarkan kesamaan etnis untuk menguatkan basis kemenangan. Realitas politik identitas tersebut sudah turun temurun atau sesuatu yang *given*. Masyarakat dalam memilih pemimpin pada akhirnya kecenderungannya adalah orientasi etnis. Pada masyarakat yang multi etnis seperti di Desa Siru menjadi sangat mungkin dengan melihat realitas politisasi etnis yang dilakukan oleh orang-orang berkepentingan.

Berdasar pada teori instrumentalisme, di mana elit-elit pusat dan daerah (desa) kerap menggunakan identitas etnis dalam memenangkan kontestasi dengan melihat struktural masyarakat yang tersusun berdasarkan klasifikasi etnis. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan dan mustahil adanya, karena hemat penulis politisasi identitas etnis bukan suatu hal yang baru dalam sejarah demokrasi di tanah air ini. Jika melihat strategi elit-elit politik di Desa Siru sangat terorganisir, pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam ruang sosialisme dilakukan secara intens.

Dari pendekatan instrumentalisme tersebut, dapat dikatakan bahwa makna politik etnis dalam penelitian ini adalah upaya melakukan politisasi etnis dalam rangka mengejar kepentingan politik. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Putri (2004), bahwa politik etnis merupakan upaya untuk melakukan mobilisasi atau menggunakan etnis dengan berdasarkan pada kesadaran akan adanya perbedaan antar satu kelompok dengan

kelompok lain. Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh kekuasaan negara, mempengaruhi kebijakan pemerintah, maupun mempengaruhi struktur dari institusi Negara.

Teori instrumentalisme yang dicetus oleh Paul Brass dan David Brown, berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dipertahankan secara reflektif dengan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan (Widayanti, 2009: 21). Sehingga disaat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis. Disaat adanya politisasi identitas, identitas itu bergerak kepentingan, identitas yang pada mulanya adalah *base on identity* dan *base on interest* telah dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Jadi dasar terjadinya politik identitas karena adanya suatu kelompok yang memiliki berbagai kepentingan.

Realitas politik identitas tersebut, dapat dilihat bahwa etnis khususnya di Desa Siru dipolitisasi atau dimanfaatkan sebagai instrumen dalam mengejar keuntungan ekonomi dan politik. Pada aspek ini, etnisitas tidak lagi sebagai kelompok etnis berjuang melakukan upaya afirmasi. Namun lebih daripada itu, identitas etnis dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengejar kepentingan politik. Hal ini sangat menarik untuk dicermati karena memperlihatkan suatu paradoks demokrasi di mana pada satu sisi kebebasan dan keberagaman semua kelompok harus dijamin, namun di sisi lain ternyata kebebasan dan keberagaman tersebut dapat digunakan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu.

b. Dominasi Sosial

Manusia sebagai makhluk multidimensi memiliki perbedaan-perbedaan berdasarkan beberapa kriteria yang terdiri atas ciri fisiologis, kebudayaan, ekonomi dan perilaku (Kinloch dalam Kinarsih, 2005). Perbedaan ini menyebabkan manusia masuk ke dalam kelompok-kelompok sosial tertentu sehingga tercipta masyarakat multikultural. Desa Siru seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa tergolong multi etnis, di mana tiap-tiap individu mengidentifikasikan dirinya di dalam masyarakat berdasarkan etnisitas.

Teori dominasi sosial yang dicetuskan oleh Jim Sidanius dan Felicia Pratto, menjelaskan bahwa setiap kelompok sosial yang luas selalu terbentuk struktur hirarki sosial. Hal ini berarti terdapat sejumlah individu atau

kelompok yang memiliki kedudukan berbeda yaitu kelompok individu atau dominan yang berada pada bagian atas hirarki dan kelompok atau subordinat yang berada di bawah hirarki. Teori ini menggambarkan realitas yang terjadi di Desa Siru, ada stereotip, diskriminasi dan intimidasi. Dalam pandangan teori ini yang menyangkut kedudukan atau jabatan, pada masyarakat Desa Siru di mana menjamurnya polititisasi etnik memungkinkan terjadinya diskriminasi yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas atau dalam teori ini terdapat suatu proposisi kelompok dominan dengan subordinat.

Berdasarkan teori Sidanius dan Pratto, konsep terbesar dari kerangka berpikir orientasi dominasi sosial terdiri atas dua asumsi ; *Asumsi pertama*, adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang cenderung disusun berdasarkan kelompok-kelompok hierarki, di mana paling tidak terdapat satu kelompok atau individu yang berada di atas dan satu kelompok atau individu yang berada di bawahnya. *Asumsi kedua*, hierarki atau tingkatan dapat didasarkan pada usia, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kebangsaan dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai pembeda di antara kelompok atau individu yang berbeda. Etnis Ndahe yang merupakan etnis dominan kerap menggunakan politisasi etnis sebagai strategi memenangkan calon. Jumlah penduduk etnis Ndahe yang dominan dimanfaatkan sebagai basis sehingga masyarakat preferensi memilihnya berdasarkan etnisitas. Strategi tersebut dengan kuasa dominasi yang dimiliki, memiliki pengaruh yang sangat kuat. Buktinya, sejak periode pertama pelaksanaan pilkades di Desa Siru hingga periode sekarang etnis Ndahe keterpilihannya menjadi kepala desa lebih sering jika dibandingkan dengan etnis yang lain (Hasil penelusuran lapangan).

Manusia memiliki kecenderungan untuk membentuk hirarki berdasarkan kelompok-kelompok sosial di mana setidaknya terdapat satu kelompok yang menikmati status sosial yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kelompok lain. Anggota kelompok sosial dominan akan menikmati bagian yang lebih besar dari nilai sosial positif, atau materi yang diinginkan yang berasal dari sumber-sumber tertentu seperti kekuasaan politik, kekayaan, perlindungan dengan kekuatan dan lain sebagainya. Menyoroti realitas di Desa Siru, etnis dominan yaitu Ndahe mendominasi kedudukan sebagai birokrat

pemerintahan di Desa Siru. Hal tersebut merupakan tindakan politis demi mewujudkan keuntungan ekonomi dan hal lainnya. Kekuasaan politik yang dimiliki oleh sebagian besar etnis Ndahe adalah suatu wujud dominasi kekuasaan sehingga anggota kelompok tersebut memperoleh bagian yang lebih besar.

c. Solidaritas Politik

Chriost (2003), menyebutkan bahwa solidaritas politik merupakan gejala postmodern politik. Gejala ini ditandai dengan akomodirnya kekuatan sosial dalam politik. Ost melihat politik sebagai alat dan tujuan sekaligus. Sebagai alat dan tujuan sekaligus maka politik memang harus menyertakan banyak aspek di dalamnya. Banyak aspek itu harus disertakan agar elit politik bisa mendapatkan kekuasaan dalam alam liberalisasi politik. Masuknya etnis dalam politik lokal di Desa Siru adalah suatu gambaran bahwa etnisitas merupakan sebagai alat dan tujuan dalam merebut kekuasaan politik.

Gerakan sosialisme semu dianggap mampu mencapai tujuan itu. Dengan demikian warga Siru sebagai konstituen dibuat dan dilakukan sama seperti logika sosialis. Berikutnya adalah menggunakan semua potensi dalam alam sosialisme itu untuk mencapai tujuan. Maka etnis digunakan untuk tujuan politik. Solidaritas politik diikat dengan tali sosial budaya di ruang sosialisme. Sosialisme semu adalah gejala di mana nilai sosialisme dipakai untuk tujuan politik. Sosialisme semu di Desa Siru ditunjukkan dengan melakukan pertemuan yang intens di dalam suatu kelompok. Gagasan ini dipelopori oleh elit-elit politik, dengan pertemuan tersebut komitmen untuk memenangkan kontestasi yang dibangun oleh kolektivitas kelompok etnis dimungkinkan berpeluang besar untuk mencapai tujuan.

Solidaritas sosial memunculkan soliditas politik sedangkan solidaritas politik berujung pada terpusatnya kekuasaan karena kepentingan tertentu. Dalam ruang solidaritas politik kegiatan politik diarahkan untuk tujuan kelompok bukan tujuan bersama. Jika melihat gerak-gerik elit politik lokal di Desa Siru, sulit untuk tidak mengatakan bahwa solidaritas politik kental menghiasi ruang politik.

2. Dampak Politik Identitas Etnis dalam Pilkades di Desa Siru

Dari informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa peran politik identitas etnis khususnya dalam

masing-masing intra etnis memiliki dampak positif dan negatif.

a. Dampak Positif

Geliat politik lokal di Desa Siru menjurus ke arah dinamis. Semua kontestan disibukkan dengan bagaimana menerapkan cara-cara dalam mempengaruhi konstituen atau masyarakat pemilih. Menyoroti pendekatan yang dilakukan oleh elit-elit politik yaitu kontestan dalam penyelenggaraan pilkades tersebut, menunjukkan suatu pendekatan yang terstruktur. Melihat masyarakat yang cenderung berada dalam suatu sistem primordialis atau suatu ikatan kekeluargaan yang kuat, kemudian masuk politik identitas sehingga tercipta suatu ruang integrasi dalam masing-masing etnis.

Dampak positif dari peran politik identitas etnis ini yaitu semakin menguatnya persatuan atau integritas masing-masing etnis karena kesadaran kolektif kelompok. Bahwa kolektivitas kelompok ini terbangun oleh konstruksi elit-elit politik yang sistemik dan terorganisir. Individu-individu diakomodir ke dalam ruang politik yang semu di mana situasi demokrasi yang paradoks terpampang nyata. Dalam situasi sosialisasi semu yang diungkapkan oleh Christos, menumbuhkan suatu solidaritas politik dengan berdiri di atas kepentingan kelompok.

Dari aspek etnis Ndahe, Tere, Jombok dan Pa'ang khususnya pada tahun politik terciptanya suatu kondisi kerekatan pada masing-masing etnis. Politik identitas tersebut semakin memperjelas identitas individu-individu di dalam masyarakat, melalui konstruktivisme oleh elit-elit politik sebagai alat dan tujuan politik. Solidaritas politik yang dibangun tersebut adalah mobilisasi massa dengan menjanjikan kesejahteraan kelompok sehingga kekuatan persaudaraan dalam etnis terakomodir dengan baik.

b. Dampak Negatif

Politik identitas yang turut serta dalam tahun pemilu pilkades di Desa Siru adalah realitas yang sudah terbangun lama. Implikasinya adalah menciptakan suatu realitas sosial yang membelah dan membagi masyarakat berdasarkan etnisitas. Hal tersebut sangat fragmentatif karena dinamika politik bergerak ke zona keterpecahan sosial, sungguh sebuah kenafian politik atau faktualitas politik. Solidaritas politik bersifat politis karena kepentingan kekuasaan.

Kesadaran persamaan dan perbedaan dalam masyarakat yang berawal dari faktor

politik mewujudkan sikap etnosentrisme pada masing-masing etnis. Khususnya dalam tahun politik tersebut masing-masing kelompok etnis berdiri atas kepentingan kelompok. Hal tersebut kemudian memicu konflik karena sikap etnosentrisme yang ditunjukkan dengan merendahkan satu sama lain. Konflik yang terjadi tergolong konflik yang kecil dan tidak menimbulkan korban jiwa, maka dalam penyelesaian konflik tersebut adalah tergantung pada kesadaran antar etnis yang berkonflik.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal ; *Pertama*, dalam kontestasi pilkades di Desa Siru peran identitas etnis sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pilkades di Desa Siru sejak dahulu sampai sekarang, hasilnya selalu didominasi dan dimenangkan oleh etnis Ndahe sebagai etnis mayoritas yang ada di Desa Siru. *Kedua*, dampak yang bisa diidentifikasi di lapangan ada dua, yakni ; dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya, adalah semakin menguatnya persatuan atau integritas masing-masing etnis karena kesadaran kolektif kelompok. Dampak negatifnya, memicu timbulnya konflik yang berskala kecil karena sikap etnosentrisme dan superior sebagai kelompok mayoritas pada satu sisi dan sikap imperior pada sisi lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis ; Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang : Indonesiatera.
- Afif. 2012. *Pola Interaksi Individu dalam Kelompok Sosial*. Unpad, Bandung : Komunikasi Politik.
- Asmore, Richard, D.; Jussim, L. Dan Wilder, David. (Eds.). 2001. *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Banks. 2005. *Ethnicity ; Anthropological Constructions*. London :Routledge.
- Barker. 2004. *Ethnicity and Nationalism (anthropological perspective)*. London : Pluto Press.
- Budiharjo, Miriam, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Chriost, Darmait Mac Giolla. 2003. *Language, Identity and Conflict: A Comparative study of language in ethnic conflict in Europe and Eurasia*. New York: Routledge.
- Daniel, N. Ponser. 2007. *Perilaku Politik Pemilu* (terjemahan). London : Routledge.
- Darity. 2005. *International Encyclopedia of the Social Sciences*. 2n ed. Volume 3. New York : Macmillan Reference.
- Mariana, Dede. 2008:62. *Mekanisme Pemilihan Kepala Desa*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Kemala. 1989. *Atribut Identitas dalam Kajian Semiotik Bahasa*. Jakarta : Bina Aksara.
- Kinasih. 2005. *Pembentukan Identitas dalam Perspektif Konstruktivisme*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bina Aksara.
- Prihartanti, Nanik dkk. 2009. *Mengurai Akar Kekerasan Etnis pada Masyarakat Pluralitas*. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 10. No. 2 Agustus 2009.
- Putri, 2004. *Pembentukan Identitas dalam Perspektif Primordialisme*. Viavegitya.unsri.ac.id
- Ramsey, Patricia.G; William, Leslie, R. Dan Vold, Edwina, Battle. 2003. *Multicultural Education: A Source Book*. 2nd ed. London: Routledge Palmer.
- Ratcliffe, P. 2006. *Conceptualizing "Race", Ethnicity and Nation: Towards a Comparative Perspective in Ratcliffe, P. (Ed). Race, Ethnicity and Nation*. London: Taylor & Francise.
- Sunardjo, Unang. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito.
- Surbakti, Ramlan. 2005. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Tirtosudarmo. *Konstruktivisme Identitas Politik*. Yogyakarta : Mata Bangsa.
- Widayanti. 2009. *Konsep Mengenai Identitas*. Yogyakarta : Mata Bangsa.
- Wijaya, H.A.M. 2008. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Wirawan. 2010. *Konflik-Konflik dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Kanisius.